

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asia Pasifik merupakan Kawasan yang paling rawan terhadap bencana alam di dunia. Negara-negara Asia Pasifik mengalami lebih banyak bencana alam daripada wilayah lain mana pun. Antara tahun 2014 hingga 2017, negara-negara di kawasan ini terkena dampak 55 gempa bumi, 217 badai dan topan, dan 236 kasus banjir parah, yang berdampak pada 650 juta orang serta menyebabkan kematian 33.000 orang.¹ Salah satu diantara negara-negara di Kawasan Asia Pasifik yang sering dilanda bencana alam adalah Fiji. Setiap tahunnya Fiji dilanda berbagai jenis bencana seperti Topan, hujan lebat, dan banjir, serta jenis bencana alam lainnya yang merupakan akibat dari peristiwa hidro-meteorologi berdampak tinggi.² Menurut penelitian yang diterbitkan oleh *International Strategy for Disaster Reduction* mengatakan bahwa bencana alam terbukti telah meningkatkan kemiskinan di Fiji dan mengurangi pertumbuhan ekonominya secara nasional.³

¹ Johnny Wood. Why Asia-Pacific is especially prone to natural disasters. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/agenda/2018/12/why-asia-pacific-is-especially-prone-to-natural-disasters/>(diakses pada 23 Desember 2019)

²UN Office for Disaster Risk Reduction. Disaster Risk Reduction in the Republic of Fiji https://www.unisdr.org/files/68251_682302fijirevised16oct2019.pdf(diakses pada 23 Desember 2019)

³Padma Narsey Lal, Reshika Singh, Paula Holland. Relationship Between Natural Disaster and Poverty: A Fiji Case Study. SOPAC Miscallenuous Report 678. 2009

Salah satu bencana alam yang dialami Fiji adalah Topan Winston yang terjadi pada bulan Februari 2016. Topan Winston tercatat sebagai salah satu badai terbesar di belahan bumi bagian Selatan. Bencana alam ini berdampak pada 62% populasi Fiji, menewaskan 44 orang, melukai ratusan dan menyebabkan 131.000 orang kehilangan tempat tinggal. Bencana ini juga menyebabkan kerusakan senilai 2 Miliar Rupiah (20% PDB Fiji).⁴

Pasca bencana alam, bantuan kepada Fiji datang dari berbagai pihak, baik Organisasi Internasional maupun negara, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia di berbagai forum semenjak 2013 memang menunjukkan inisiatif dalam memberikan bantuan, tidak hanya di kawasan ASEAN namun juga dalam konstruk geostrategik baru di kawasan Pasifik dimana Indonesia dianggap mulai memperluas skope konsentrasinya hingga kawasan Pasifik.⁵ Pada kasus Fiji, Indonesia memberikan bantuan US\$5 juta untuk pemulihan pasca bencana. Dana tersebut dibagi dua, US\$2 juta atau Rp27 miliar diserahkan tunai saat pertemuan, sementara sisanya, US\$3 juta atau Rp40 miliar diserahkan kemudian dalam bentuk barang.⁶ Bantuan uang langsung diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan yang mengunjungi Fiji pada Maret 2016. Dalam

⁴The World Bank. Resilience & love in action: Rebuilding after Cyclone Winston. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/11/07/resilience-love-in-action-rebuilding-after-cyclone-winston>(diakses pada 23 Desember 2019)

⁵Vibhanshu, Shekhar.Indonesia's Foreign Policy and Grand Strategy in The 21st Century:Rise of Indo-Pacific Power.Abingdon: Routledge, 2018.

⁶BBC. Bantu Fiji, Indonesia ingin redam gerakan pembebasan Papua. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160329_indonesia_fiji_papua_bantuan(diakses pada 23 Desember 2019)

kunjungan tersebut Menko Polhukam RI didampingi oleh beberapa pejabat tinggi di tingkat pusat hingga daerah.

Bantuan kemanusiaan secara umum didefinisikan sebagai bantuan yang diberikan dalam rangka untuk menyelamatkan hidup, meringankan penderitaan, memelihara serta memberikan perlindungan selama atau pasca terjadinya krisis yang diakibatkan oleh manusia dan bencana alam, dan juga mencegah serta memperkuat kesiapan untuk menghadapi terjadinya peristiwa serupa.⁷ Menurut *Good Humanitarian Donorship Principles* terdapat empat prinsip dalam *humanitarian action* atau tindakan kemanusiaan antara lain *humanity*, *impartiality*, *neutrality*, dan *independence*.⁸ Maksud Independence sebagai salah satu prinsipnya adalah berbicara mengenai tindakan kemanusiaan yang dilakukan bebas atau bersih dari motif atau kepentingan politik, ekonomi, militer, dan lain-lain dari aktor terkait dengan dimana tindakan kemanusiaan tersebut dilakukan.⁹

Pada kasus bantuan kemanusiaan Indonesia ke Fiji, Indonesia terlihat memiliki kepentingan politik terhadap Fiji. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa agenda pemberian bantuan oleh Indonesia melalui kunjungan Menko Polhukam RI bukan merupakan agenda khusus, namun merupakan bagian dari agenda kunjungan kerja Menko Polhukam RI beserta delegasi dalam rangka mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Setelah mengunjungi Fiji

⁷Global Humanitarian Assistance, *Defining Humanitarian Assistance*, diakses dari: <http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-humanitarian-aid/>

⁸UNOCHA, *What Are Humanitarian Principles?* diakses dari: https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf

⁹UNOCHA, *What Are Humanitarian Principles?*

itu menyerahkan bantuan secara simbolis, yang diikuti dengan beberapa kerjasama yang dilakukan, rombongan Menko Polhukam RI tersebut melanjutkan kunjungannya ke Papua New Guinea.¹⁰

Setelah mengadakan pertemuan dengan PM Fiji untuk memberikan bantuan secara simbolik, Menko Polhukam RI beserta delegasi melanjutkan kunjungannya ke kantor Kementerian Pertanian, Pembangunan Wilayah Pedesaan dan Kelautan serta Manajemen Bencana Nasional Fiji. Pada kunjungan tersebut Menko Polhukam beserta delegasi bertemu dengan Menteri Pertanian, Pembangunan Wilayah Pedesaan dan Kelautan serta Manajemen Bencana Nasional Fiji, dan menawarkan penguatan kerjasama di sejumlah bidang yang menjadi kebutuhan dan sesuai dengan tantangan dan potensi kedua negara seperti pertanian, mitigasi bencana, dan perikanan.¹¹

Selain banyaknya agenda yang mengikuti pemberian bantuan kemanusiaan oleh Indonesia kepada Fiji pada bencana Angin Topan Winston, bantuan ini terlihat politis juga karena Fiji merupakan mitra penting dalam meredam kegiatan organisasi pembebasan Papua Barat melalui *West Papua National Coalition for Liberation* (WPNCL) atau dewan nasional pembebasan Papua Barat dan organisasi pembebasan papua lainnya diantara negara-negara Melanesia terkhususnya organisasi kawasan mereka *Melanesian Spearhead Group* (MSG). Bentuk dukungan nyata diberikan Fiji adalah menjadi pendukung status pengamat Indonesia di MSG pada tahun 2011.

¹⁰ Tirto. 28 Maret 2016. Luhut: Negara-negara Asia Pasifik Salah Satu Prioritas Utama. Diakses melalui <https://tirto.id/luhut-negara-negara-asia-pasifik-salah-satu-prioritas-utama-vYN>

¹¹ Tirto. 31 Maret 2016. Bantuan Topan Winston Buka Kerjasama Indonesia Fiji. Diakses dari <https://tirto.id/bantuan-topan-winston-buka-kerjasama-indonesia-fiji-xRT>

Sebenarnya Indonesia sudah mengajukan diri pada 2010 namun ditolak keras oleh Vanuatu, sehingga baru diterima pada tahun 2011 atas bantuan Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama, yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua KTT Pemimpin MSG.¹² Bergabungnya Indonesia sebagai anggota dengan status pengamat di MSG menjadi suatu hal yang penting karena organisasi ini juga menjadi tempat perjuangan organisasi-organisasi pembebasan Papua Barat seperti *West Papua National Coalition for Liberation* (WPNCL) dan *United Liberation for West Papua* (ULMWP).

Tujuan utama bantuan kemanusiaan sejatinya fokus kepada aspek kemanusiaan seperti untuk menyelamatkan jiwa, meringankan penderitaan, dan mempertahankan martabat manusia, dengan salah satu prinsipnya *independence* atau bersih dari adanya motif politik. Namun pada kasus bantuan kemanusiaan oleh Indonesia kepada Fiji pada bencana Angin Topan Winston tahun 2016, penulis melihat ada tujuan politik yang ingin dicapai Indonesia melalui bantuan tersebut. Oleh karena itu menarik bagi penulis untuk meneliti alasan pemberian bantuan kemanusiaan oleh Indonesia kepada Fiji pasca bencana Angin Topan Winston tahun 2016.

¹²The Lowy Institute. West Papua: Melanesian Spearhead Group has atough decision to make. <http://www.lowyinterpreter.org/the-interpreter/west-papua-melanesian-spearhead-group-has-tough-decision-make>

1.2 Rumusan Masalah

Kawasan Asia Pasifik merupakan Kawasan paling rawan bencana di dunia, tidak terkecuali Fiji sebagai salah satu negara yang terletak di Kawasan ini. Contohnya saja Topan Winston yang melanda Fiji pada Februari 2016, menyebabkan kerugian senilai 2 Miliar Rupiah atau 20% dari PDB Fiji. Pasca bencana ini berdatangan bantuan dari berbagai pihak, salah satunya Indonesia. Di bulan Maret 2016 atau sebulan pasca bencana, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan langsung datang ke Fiji memberikan bantuan kemanusiaan. Salah satu prinsip bantuan kemanusiaan adalah *Independence* atau bebas dari motif politik, militer dan sebagainya. Namun pada kasus bantuan Indonesia ke Fiji ini, terlihat ada motif politik dibalik bantuan. Hal ini dapat dilihat dari agenda pemberian bantuan melalui kunjungan Menko Polhukam RI bukanlah agenda khusus, melainkan serangkaian kunjungan diplomatik Indonesia dalam mempererat hubungan dengan negara pasifik. Disamping itu Fiji memang punya posisi strategis bagi Indonesia dalam bekerja sama, terlebih dalam meredam kegiatan organisasi pembebasan Papua Barat di Kawasan negara-negara Melanesia terkhusus melalui organisasinya yaitu *Melanesian Spearhead Group*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengapa Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada Fiji pada bencana Angin Topan Winston tahun 2016?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melihat alasan Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada Fiji.
2. Melihat kepentingan politik Indonesia melalui pemberian bantuan kemanusiaan pada Fiji pasca bencana Angin Topan Winston tahun 2016.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih manfaat, seperti:

1. Sebagai referensi ilmiah bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang tertarik dalam membahas isu humaniter.
2. Menjadi salah satu sumber referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional terutama di Universitas Andalas dalam membahas politik melalui bantuan kemanusiaan.

1.6 Studi Pustaka

Pada bagian studi pustaka, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dipublikasikan, telah menyediakan informasi yang relevan dengan judul penelitian “Analisis Bantuan Kemanusiaan Indonesia kepada Fiji Pasca Bencana Angin Topan Winston tahun 2016”.

Penelitian pertama adalah sebuah artikel dari jurnal *International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS)* berjudul *Disaster Relief as Indonesia Soft Power Diplomacy Case of Cyclone Pam in Vanuatu*. Penelitian ini membahas tentang

bagaimana Indonesia melakukan Diplomasi melalui bantuan bencana alam ke Vanuatu pada kasus Topan Pam. Penelitian ini ingin menjawab bagaimana proses pemberian bantuan bencana yang diberikan Indonesia ke Vanuatu serta bagaimana bantuan bencana dapat dianalisis sebagai *soft power diplomacy* Indonesia ke Vanuatu.¹³ Kesimpulan pada penelitian ini adalah pemberian bantuan bencana ke Vanuatu adalah bagian dari upaya Indonesia untuk melakukan diplomasi. Dalam istilah ini, Indonesia menggunakan soft power dalam melakukan hubungan bilateral dengan Vanuatu. Itu dapat dianalisis dari tiga sumber utama soft power; budaya, nilai, dan kebijakan luar negeri. Bantuan bencana yang diberikan Indonesia kepada Vanuatu menciptakan peluang untuk mendekati pemerintah Vanuatu untuk hubungan yang lebih baik di masa depan, terutama terkait dengan masalah Papua.

Penelitian kedua adalah jurnal yang berjudul “Calculation of Goodwill: Humanitarianism, Strategic Interest, and the US Response to Typhoon Yolanda” oleh Chris J. Dolan dan Alynna J. Lyon. Melalui tulisan tersebut Dolan dan Lyon mengemukakan bahwa partisipasi Amerika Serikat (AS) respon global terhadap bencana Topan Yolanda (Haiyan) di Filipina pada tahun 2013 yang tidak hanya dilatarbelakangi oleh alasan kemanusiaan tetapi juga kepentingan strategis AS terhadap Filipina. Kepentingan strategis tersebut berkaitan dengan kedekatan Filipina dengan AS yang memiliki pengaruh terhadap peran AS di kawasan Asia dan Pasifik. Filipina

¹³Devi Ayu Puspito Sari, Sutisna Sobar Wati dan Vrameswari Omega. “Disaster Relief as Indonesia Soft Power Diplomacy Case of Cyclone Pam in Vanuatu.” *International Journal of Multi Disipline Science*, 2018.

dalam hal ini dapat dikatakan sebagai *pivot* atau titik penting yang strategis bagi AS untuk mencapai kepentingan nasionalnya di kawasan Asia dan Pasifik.¹⁴

Penelitian ketiga adalah artikel pada Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Universitas Parahyangan yang berjudul *Disaster Diplomacy as an Alternative Approach For Indonesia's Instrument of Foreign Policy In ASEAN*. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana diplomasi bencana Indonesia memiliki kontribusi terhadap peningkatan kemampuan negara-negara di ASEAN dalam hal pengelolaan bencana alam. Penelitian ini juga membahas bagaimana bencana alam yang dihadapi Indonesia dapat menjadi modal untuk menghapuskan rintangan diplomatik tertentu, memperbaiki kerjasama regional Indonesia dengan ASEAN, dan juga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kunci dalam penanganan bencana regional. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa sebagai negara yang telah berpengalaman dalam menghadapi bencana, Indonesia dianggap sebagai aktor kunci untuk meningkatkan kemampuan regional ASEAN seperti yang ditunjukkan oleh kontribusi Indonesia terhadap upaya mitigasi bencana di ASEAN. Diplomasi bencana menyediakan perspektif baru untuk masalah bencana. Bencana tidak hanya dilihat dan dianalisis dari sisi negatif, tetapi lebih pada sisi positif. Perspektif ini juga melihat potensi Indonesia dalam melakukan diplomasi bencana, hal ini ditunjukkan dengan bagaimana Indonesia membuka kemungkinan untuk melakukan kerjasama dan

¹⁴Chris J. Dolan dan Alynna J. Lyon, Calculation of Goodwill: Humanitarianism , Strategic Interest, and the US Response to Typhoon Yolanda, *Global Security and Intelligence Studies*, Volume 2, Number 1, Article 5, Fall 2016, hal. 33-61, diakses dari: <http://digitalcommons.apus.edu/gsis/vol2/iss1/5> pada 23 Mei 2020

memberikan bantuan internasional serta menghilangkan hambatan ketika pemerintah Indonesia masih dalam situasi konflik dengan GAM.¹⁵

Penelitian keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Eric Neumayer dengan judul *Is the Allocation of Food Aid Free from Donor Interest Bias?*. Melalui tulisan tersebut Neumayer mengemukakan hasil penelitiannya mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi alokasi *food aid* atau bantuan pangan termasuk diantaranya yang berkaitan dengan bias atau kepentingan dari donor bantuan terhadap negara resipien. Faktor-faktor tersebut ditemukan setelah Neumayer melakukan analisis beserta perbandingan terhadap empat donor yang berbeda, yakni AS selaku negara donor, European Union (EU) atau Uni Eropa, World Food Programme (WFP) yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), dan Non-Governmental Organization (NGO) atau organisasi non-pemerintah lainnya yang bergerak di bidang pangan selaku donor non-negara pada dekade 1990an atau pasca berakhirnya Perang Dingin. Setelah melakukan analisis beserta perbandingan tersebut, Neumayer meneumukan adanya kecenderungan bantuan pangan yang diberikan oleh negara donor dilatarbelakangi oleh hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dari negara donor tersebut.¹⁶

¹⁵Arfin Sudirman, Animbyo CahyaPutra. *Disaster Diplomacy as an Alternative Approach For Indonesia's Instrument of Foreign Policy In ASEAN*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Vol 14 No 1 (2018)

¹⁶Eric Neumayer, *Is the Allocation of Food Aid Free from Donor Interest Bias?*, *The Journal of Development Studies*, Vol. 41, No. 3, April 2005, hal. 394-411, diakses dari:<http://eprints.lse.ac.uk/16689/> pada 22 Mei 2020

Penelitian kelima adalah artikel jurnal dari Ilan kelman yang berjudul *Hurricane Katrina Disaster Diplomacy*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kegiatan yang berkaitan dengan bencana badai Katrina yang dialami oleh Amerika Serikat berpengaruh pada kegiatan Diplomatik. Bagaimana respon Internasional terhadap bencana alam ini dan bagaimana kemudian pemerintah Amerika Serikat merespon kembali dalam konteks kebijakan luar negerinya. Hasil penelitian Kelman pada penelitian menunjukkan bahwa pada kasus badai Katrina dapat mempengaruhi kegiatan Diplomasi dalam jangka pendek, namun tidak dalam jangka panjang. Meskipun begitu bencana tetap dapat menjadi katalisator bagi Diplomasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada kesimpulan Kelman bahkan ketika pemerintah tidak memilih untuk mengambil kesempatan melakukan diplomasi bencana, atau secara aktif mencoba menghindarinya, hasil diplomasi bencana tetap dapat terjadi secara tidak sengaja atau sengaja melalui inisiatif yang dipimpin oleh kelompok atau yang dipimpin oleh orang.¹⁷

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Politik Bantuan Kemanusiaan

Konsep *the Politics of Humanitarian Aid* atau Politik Bantuan Kemanusiaan merupakan konsep hasil penelitian dari A. Cooper Drury, Richard Stuart Olson, dan Douglas A. Van Belle yang dikemukakan dalam tulisannya yang berjudul *the Politics*

¹⁷Ilan Kelman. "Hurricane Katrina Disaster Diplomacy" Overseas Development Institute (2007): 288-309

*of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance, 1964-1995.*¹⁸ Tulisan tersebut merupakan sebuah jurnal hasil penelitian yang membahas secara khusus mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan oleh suatu negara. AS merupakan negara yang menjadi objek penelitian oleh Drury, Olson, dan Van Belle. Drury, Olson, dan Van Belle melakukan analisis terhadap bantuan kemanusiaan yang telah diberikan oleh AS ke berbagai negara dalam kurun waktu 1964-1995 untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan tersebut selain untuk kepentingan atau tujuan kemanusiaan. Drury, Olson, dan Van Belle dalam melakukan analisis pemberian bantuan kemanusiaan ini melihat adanya keterkaitan atau hubungan antara bantuan kemanusiaan yang diberikan dengan faktor politik maupun non-politik sebelum melakukan analisis data terkait dan kebijakan negara donor terkait pemberian bantuan kemanusiaan.

Faktor politik merupakan faktor yang penting dalam analisis konsep the Politics of Humanitarian Aid ini. Selain konsep tersebut merupakan konsep yang secara khusus membahas bantuan kemanusiaan dari sudut pandang politik, bantuan kemanusiaan sejatinya tidak dapat dilepaskan dari politik. Mengingat dalam proses pengambilan kebijakan bantuan kemanusiaan tersebut melewati proses politik sehingga faktor politik menjadi faktor utama yang harus dilihat dalam pemberian bantuan kemanusiaan khususnya penentuan alokasi jumlah bantuan.¹⁹ Indikator yang dapat digunakan untuk

¹⁸OlsonDrury dan Van Belle, *The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995*, *The Journal of Politics*, Vol.67, No. 2, Mei 2005, 454-473 <http://www.jstor.org/stable/10.1111/j.1468-2508.2005.00324.x>

¹⁹Drury, Olson, dan Van Belle, *The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995* hal. 460

mengetahui faktor politik tersebut antara lain kedekatan antara negara donor dan negara resipien dalam hal hubungan diplomatik maupun aliansi dan kondisi politik di dalam negeri negara donor maupun negara resipien.

Walaupun faktor politik merupakan faktor utama dalam konsep *the Politics of Humanitarian Aid*, Drury, Olson, dan Van Belle juga memasukkan faktor non-politik sebagai faktor yang juga mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain faktor politik yang telah dijelaskan sebelumnya faktor non-politik seperti kondisi dari negara resipien dan jenis bencana yang terjadi ikut mempengaruhi negara donor dalam memberikan bantuan kemanusiaannya khususnya menentukan jumlah alokasi jumlah bantuan.

Melalui AS sebagai objek penelitiannya, Drury, Olson, dan Van Belle berhasil mengemukakan hasil analisis yang dilakukannya bahwa faktor politik dan non-politik mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan oleh AS khususnya dalam alokasi jumlah bantuan. Hasil analisis tersebut membuktikan bahwa faktor politik merupakan faktor yang cukup kuat mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan oleh AS. Melalui hasil analisis tersebut diketahui bahwa AS memberikan bantuan kemanusiaan yang lebih besar kepada negara yang menjadi aliansinya dibandingkan negara yang bukan aliansinya.²⁰ Selain itu Perang Dingin juga menjadi faktor politik yang ikut mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan oleh AS. Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh AS banyak dipengaruhi oleh tujuan melindungi aliansi yang dimilikinya

²⁰Drury, Olson, dan Van Belle, *The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995*, hal. 466

dan melebarkan pengaruh yang dimilikinya ke negara-negara yang bukan bagian dari aliansinya. Dalam kata lain bantuan kemanusiaan tersebut diberikan oleh AS untuk membendung pengaruh dari lawan politiknya yakni Uni Soviet.

1.7.1.1 Hubungan Politik

Political connections atau hubungan politik merupakan variabel pertama dari konsep *the Politics of Humanitarian Aid* yang dikemukakan oleh Drury, Olson, dan Van Belle. Hubungan politik merupakan faktor yang cukup menentukan atau memberikan pengaruh bagi negara donor dalam memberikan bantuan kemanusiaannya baik menentukan apakah bantuan tersebut layak atau tidak dan jumlah alokasi bantuan tersebut kepada negara resipien. Terdapat beberapa faktor atau sub-variabel dalam variabel ini antara lain, *donor's foreign policy concerns or reservation about potential recipient state* atau fokus kebijakan luar negeri dari negara donor dan potensi dari negara resipien, *donor's domestic political concerns* atau kondisi politik dalam negeri dari negara donor, dan *domestic politics within the potential recipient state* atau kondisi politik dalam negeri dari negara resipien.²¹

1.7.2.1 Fokus Kebijakan Luar Negeri Donor terhadap Negara Penerima

Seperti yang telah dijelaskan di sub-bab sebelumnya bantuan kemanusiaan merupakan salah satu jenis dari bantuan luar negeri yang merupakan salah satu instrumen kebijakan luar negeri dari suatu negara. Oleh karena itu mengapa fokus

²¹Drury, Olson, dan Van Belle, *The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995*, hal. 456

kebijakan luar negeri dari negara donor dapat dikatakan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemberian bantuan kemanusiaan tersebut. Hal tersebut tentunya berkaitan erat dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh negara donor melalui pemberian bantuan kemanusiaan tersebut. Terdapat empat indikator antara lain, *alliance* atau aliansi, *the Cold War* atau Perang Dingin, *the recipient's regime type* atau jenis rezim dari negara resipien, dan *it's level of development* atau tingkat pembangunan di negara resipien untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi negara donor dalam memberikan serta mengalokasikan jumlah bantuan kemanusiaannya kepada negara resipien.²²

Menurut Drury, Olson, dan Van Belle negara yang menjadi aliansi dari negara donor memiliki peluang lebih besar untuk menerima bantuan kemanusiaan dan mendapatkan alokasi jumlah bantuan kemanusiaan yang lebih besar apabila dibandingkan negara yang tidak menjadi aliansi dari negara donor.²³ Bantuan kemanusiaan tersebut diberikan salah satunya dengan tujuan untuk memulihkan atau menstabilkan kembali kondisi di negara resipien yang merupakan negara aliansinya. Masih berkaitan dengan indikator sebelumnya, indikator selanjutnya yakni Perang Dingin dimana AS sebagai objek penelitian Drury, Olson, dan Van Belle memberikan bantuan kemanusiaannya kepada negara-negara netral yang tidak berpihak kepada AS maupun Uni Soviet hingga negara-negara yang menjadi aliansi Uni Soviet. Tujuan dari pemberian bantuan tersebut utamanya adalah menyebarkan pengaruhnya kepada

²²Drury, Olson, dan Van Belle, *The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995*, hal. 457

²³Drury, Olson, dan Van Belle, *The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995*, hal. 457

negara-negara tersebut atau mencari aliansi baru. Penggunaan istilah aliansi dan dilibatkannya Perang Dingin sebagai indikator dalam konsep *the Politics of Humanitarian Aid* tidak lepas dari digunakannya AS sebagai objek penelitian dan ruang lingkup penelitian yang sebagian besar dilakukan pada masa berlangsungnya Perang Dingin yakni pada tahun 1964-1995.

Indikator jenis rezim yang dijalankan oleh negara resipien berbicara mengenai kedekatan dari sisi ideologi antara negara donor dan negara resipien. Bantuan kemanusiaan akan lebih mudah diberikan oleh negara donor kepada negara yang memiliki kesamaan ideologi, semakin dekat atau sama ideologi yang dimiliki oleh negara donor dan negara resipien tentunya akan semakin dekat hubungan antara kedua negara, maka akan semakin mudah juga negara donor dalam memberikan bantuan kemanusiaannya.²⁴ Oleh karena itu negara resipien yang secara ideologi memiliki kesamaan dengan negara donor bantuan kemanusiaan akan memiliki peluang lebih besar dalam mendapatkan bantuan kemanusiaan dan mendapatkan alokasi jumlah bantuan yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki kesamaan ideologi.

Tingkat pembangunan dari negara resipien merupakan indikator yang berkaitan dengan kemampuan dan kondisi kekayaan yang dimiliki oleh negara resipien. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan kemampuan dari negara resipien dalam melakukan penanganan bencana. Semakin tinggi tingkat pembangunan atau kekayaan dari negara resipien maka semakin besar pula kemampuan negara tersebut dalam mengatasi

²⁴Drury, Olson, dan Van Belle, *The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995*, hal. 457

dampak dari bencana yang melanda wilayahnya. Oleh karena itu negara donor akan memberikan alokasi bantuan yang lebih sedikit kepada negara yang tingkat pembangunannya tinggi atau kaya akan sumber daya domestik.²⁵

1.7.2.2 Kondisi Politik Negara Donor

Kondisi politik domestik dari negara donor merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan pemberian bantuan luar negeri termasuk diantaranya adalah bantuan kemanusiaan yang merupakan bentuk kebijakan luar negeri suatu negara tentunya ikut dipengaruhi oleh kondisi politik domestik. Kebijakan tersebut harus melewati berbagai tahapan-tahapan politik domestik yang juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi proses perumusan dan pengambilan kebijakan bantuan kemanusiaan suatu negara, yakni *current budget deficit*, *salience of the disaster*, dan *current donor disasters*.²⁶

Current budget deficit atau defisit anggaran negara yang tengah dialami oleh negara donor terkait dengan dana yang dialokasikan khusus untuk keperluan pemberian bantuan luar negeri. Anggaran negara yang dialokasikan untuk keperluan pemberian bantuan luar negeri khususnya bantuan kemanusiaan bersifat tidak tetap atau *tentative* mengikuti seberapa besar pendapatan dan kebutuhan anggaran belanja negara. Oleh karena itu defisit anggaran negara menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap

²⁵Drury, Olson, dan Van Belle, *The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995*, hal. 458

²⁶Drury, Olson, dan Van Belle, *The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995*, hal. 458

pemberian bantuan kemanusiaan oleh suatu negara. Negara donor bantuan kemanusiaan tentunya telah mempertimbangkan defisit anggaran yang dimilikinya sebelum memberikan bantuan kemanusiaan. Defisit anggaran yang muncul akibat alokasi bantuan kemanusiaan yang terlampau besar tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi domestik negara khususnya kondisi pemerintahan yang sedang berlangsung. Jika negara donor bantuan kemanusiaan sedang dalam keadaan defisit anggaran maka alokasi bantuan kemanusiaan yang diberikan akan cenderung menurun atau berkurang jumlahnya.²⁷

Saliency of the disaster atau seberapa *viral*-nya bencana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat internasional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan oleh suatu negara. Media merupakan pihak yang berperan cukup besar dalam *viral*-nya suatu bencana. Semakin besar perhatian yang diberikan oleh media terhadap suatu bencana berimplikasi pada *viral*-nya bencana tersebut. Oleh karena itu semakin besarnya media terhadap suatu bencana akan diikuti oleh semakin besarnya alokasi bantuan kemanusiaan dari negara donor.²⁸

Current donor disaster atau seberapa besar dampak bencana yang sebelumnya pernah dialami oleh negara donor. Apabila negara donor sebelumnya pernah mengalami bencana besar yang mungkin sama dengan bencana yang dialami oleh negara resipien memungkinkan munculnya kepekaan tertentu atau rasa empati, khususnya dari pemerintah selaku perumus kebijakan dan masyarakat negara donor

²⁷Drury, Olson, dan Van Belle, *The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995*, hal. 458

²⁸Drury, Olson, dan Van Belle, *The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995*, hal 458

yang memunculkan keinginan untuk memberikan bantuan kemanusiaan atau bahkan lebih dari itu.²⁹ Faktor ini merupakan faktor yang berbicara mengenai rasa empati yang ditunjukkan oleh negara donor terhadap bencana yang terjadi di negara resipien sekaligus meningkatkan alokasi bantuan kemanusiaannya.

Bantuan kemanusiaan pada dasarnya merupakan bantuan yang bebas dari motif atau kepentingan politik akan tetapi faktanya dalam proses perumusan serta pengambilan kebijakan alokasi bantuan kemanusiaan tersebut melalui berbagai proses politik baik di tingkat domestik maupun internasional. Oleh karena itu ketiga faktor yang telah dijelaskan diatas memiliki pengaruh terhadap pemberian bantuan kemanusiaan oleh negara donor, baik keputusan diberikan atau tidaknya bantuan tersebut dan alokasi jumlah bantuan yang akan diberikan kepada negara resipien yang sedang dilanda bencana.

1.7.2.3 Kondisi Politik Domestik Negara Penerima

Faktor politik lainnya yang dapat mempengaruhi alokasi bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara donor adalah kondisi politik domestik dari negara resipien. Namun dalam tulisannya, Drury, Olson, dan Van Belle menyatakan bahwa analisisnya berfokus pada dua faktor atau sub-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni *donor foreign policy concerns or reservation about the potential recipient state* dan *donor domestic political concerns*, hal tersebut dikarenakan pada sub-variabel ketiga yakni, *domestic politics within the potential recipient state* tidak jelas apakah politik

²⁹Drury, Olson, dan Van Belle, *The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995*, hal. 459

domestik negara resipien secara konsisten memberikan pengaruh terhadap alokasi bantuan kemanusiaan negara donor.³⁰

Namun Drury, Olson, dan Van Belle menyatakan bahwa tetap ada kemungkinan bahwa kondisi politik negara resipien seperti tingkat korupsi yang tinggi, efisiensi penggunaan bantuan yang buruk oleh negara resipien, serta kondisi pemerintahan negara resipien yang tidak kondusif dapat mempengaruhi negara donor untuk mempertimbangkan kembali bantuan kemanusiaan yang diberikannya.³¹ Dalam sub-variabel ini indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari politik domestik negara resipien terhadap pemberian bantuan kemanusiaan oleh negara donor adalah *recipient's level of corruption* dan *recipient's political fractiousness*.³² *Recipient's level of corruption* atau tingkat korupsi dari pemerintah di negara resipien memiliki pengaruh terhadap alokasi bantuan kemanusiaan dari negara donor. Tingkat korupsi tersebut berbanding terbalik dengan alokasi bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara donor, Semakin tinggi tingkat korupsi dari pemerintah di negara resipien maka akan semakin rendah alokasi bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara donor, begitupun sebaliknya. *Recipient's political fractiousness* atau ketegangan politik domestik yang terjadi di negara resipien merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan negara donor untuk menentukan apakah bantuan

³⁰Drury, Olson, dan Van Belle, *The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995*, hal. 459

³¹Drury, Olson, dan Van Belle, *The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995*, hal 459

³²Drury, Olson, dan Van Belle, *The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995*, hal 459

kemanusiaan tersebut layak untuk dikirimkan atau tidak dan seberapa besar alokasi bantuan kemanusiaan yang harus diberikan kepada negara resipien.

1.7.3. Faktor Non Politik

Selain faktor-faktor politik yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor non-politik juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam pemberian bantuan kemanusiaan oleh suatu negara. Faktor non-politik tersebut menjadi variabel kedua dalam konsep *the Politics of Humanitarian Aid* yang dikemukakan oleh Drury, Olson, dan Van Belle. Terlepas dari adanya faktor politik yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan oleh suatu negara, terdapat faktor non-politik berupa bencana itu sendiri yang juga mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan tersebut dan dijelaskan melalui indikator *type of disaster*.³³ Indikator tersebut merupakan satu-satunya indikator yang digunakan untuk mengetahui adanya faktor non-politik yang ikut mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan.

1.7.3.1 Jenis Bencana

Type of disaster atau jenis bencana yang terjadi di negara resipien merupakan indikator dari faktor non-politik yang mempengaruhi negara donor dalam memberikan bantuan kemanusiannya. Seberapa besar atau parahnya dampak dari bencana yang terjadi di negara resipien menentukan alokasi serta jenis bantuan kemanusiaan yang

³³Drury, Olson, dan Van Belle, *The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995*, hal. 459

diberikan oleh negara donor, semakin banyak korban serta kerugian akibat bencana maka dibutuhkan pula respon yang cepat dan tepat dari negara donor.³⁴

Secara umum terdapat dua jenis bencana yang terjadi di dunia, yakni bencana alam dan bencana yang diakibatkan oleh manusia. Namun Drury, Olson, dan Van Belle memiliki penjelasan khusus dalam konsep *the Politics of Humanitarian Aid* ini, antara lain *technological disasters* dengan contoh bencana kebocoran gas beracun di Bhopal, India, *complex-humanitarian emergencies* seperti yang terjadi di Somalia, Rwanda, dan Bosnia, dan *natural disaster* atau bencana alam.³⁵ *Technological disasters* dan *complex-humanitarian emergencies* merupakan bencana yang merujuk pada bencana yang diakibatkan oleh manusia. Dua jenis bencana tersebut dapat dikatakan memiliki keterkaitan dalam hal politik mengingat melibatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas bencana yang terjadi. Sedangkan *natural disaster* atau bencana alam memiliki keterkaitan politik yang lebih rendah dibandingkan dua jenis bencana lainnya mengingat proses terjadinya bencana diakibatkan oleh aktivitas alam.

1.8 Metodologi

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif dalam menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini dipilih karena mampu mengidentifikasi permasalahan dan menjelaskan dengan lengkap bagaimana suatu isu dapat terjadi. Metode ini dapat

³⁴Drury, Olson, dan Van Belle, *The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995*, hal. 460

³⁵Drury, Olson, dan Van Belle, *The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995*, hal 460

menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu isu dengan lebih rinci dibandingkan dengan metode lainnya. Sehingga dapat melihat sebab akibat bantuan kemanusiaan oleh Indonesia kepada Fiji.

1.8.2. Batasan Penelitian

Agar pembahasan tidak melebar, penulis mencoba memberi batasan waktu pada penelitian yaitu pada tahun 2016 yang merupakan tahun terjadinya bencana Angin Topan Winston.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis pada penelitian ini adalah bantuan kemanusiaan Indonesia ke Fiji. Sedangkan unit eksplanasi pada penelitian ini adalah hubungan Fiji dan Indonesia. Tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada tingkat Negara, yakni Negara Indonesia.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh website resmi beberapa negara, diantaranya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Sekretaris Negara RI, Kedutaan Besar RI di Fiji, dan *Ministry of Foreign Affairs* Fiji. Selain itu data Primer juga didapat dari website resmi *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA)*.

Data sekunder diperoleh dari beberapa jurnal hasil penelitian, beberapa buku, dan publikasi resmi dari beberapa pihak seperti *World Bank* yang mendukung penelitian. Data sekunder juga didapatkan melalui berbagai sumber di internet, seperti situs berita

dan pengetahuan umum, yang berisi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data melalui internet, *keyword* yang digunakan adalah: bencana Angin Topan Winston, hubungan Indonesia dengan Fiji, *Melanesian Spearhead Group* dan *the Politics of Humanitarian Aid*.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan melalui beberapa tahap. Pertama adalah tahap pengelompokan data. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data-data yang sudah dikumpulkan kedalam beberapa kategori sesuai dengan alur penelitian ini. Awalnya peneliti mengumpulkan data terkait bencana Angin Topan Winston dan bantuan dari Indonesia ke Fiji, bagaimana sejarah hubungan Indonesia dan Fiji, serta kondisi politik di masing-masing negara. Kedua adalah tahap reduksi data. Dalam tahap ini, peneliti melakukan penyeleksian terhadap data-data yang tidak terlalu relevan dengan penelitian yang akan dianalisis agar dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian. Ketiga adalah tahap interpretasi dan penyajian data. Data-data yang telah diseleksi tadi diinterpretasikan dan disajikan kembali oleh peneliti dalam bentuk analisis dengan menggunakan kerangka konseptual *the Politics of Humanitarian Aid*. Terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk melihat apa alasan pemberian bantuan kemanusiaan oleh Indonesia kepada Fiji pada bencana Angin Topan Winston dilihat dari indikator konsep *the Politics of Humanitarian Aid*.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan pengolahan data, serta sistematika penulisan.

BAB II: Bencana Angin Topan Winston dan Bantuan Kemanusiaan Indonesia

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan bagaimana bencana Angin Topan Winston yang dialami Fiji. Penjelasan meliputi proses terjadinya bencana, dampak, akibat yang ditimbulkan oleh bencana, serta penanganan pasca bencana.

BAB III: Bantuan Kemanusiaan Indonesia Ke Fiji pada Bencana Angin Topan Winston

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai bantuan yang diberikan oleh Indonesia kepada Fiji. Penjelasan meliputi bentuk bantuan yang diberikan, jumlah bantuan yang diberikan, bagaimana proses pemberian bantuan, serta hubungan antara Indonesia dan Fiji pasca pemberian bantuan.

BAB IV: Analisis Bantuan Bencana Indonesia ke Fiji pada Topan Winston

Pada bab ini penulis akan menganalisa apa alasan Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada Fiji pada bencana Angin Topan Winston menggunakan variabel. Sub-variabel dan indikator yang terdapat dalam konsep *the Politics of Humanitarian Aid*.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini peneliti akan menuliskan kesimpulan dan hasil dari penelitian peneliti dan juga saran.

